

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional .

Era globalisasi yang sangat cepat berjalan dan sangat sulit dibendung oleh pemerintah membuat hal ini menjadi permasalahan besar bagi negara yang dalam tahap perkembangan dikarenakan masyarakat belum siap sepenuhnya guna memanfaatkan arus globalisasi . Untuk menjaga karakter bangsa agar tidak terbawa gejolak perubahan budaya maka diperlukan sebuah ilmu yang mampu menjaga dan membenahi karakter bangsa untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik , untuk itu ilmu kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara. Harapan dari pendidikan kewarganegaraan dari konteks permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah untuk membentuk karakter bangsa yang tidak mudah terbawa arus globalisasi serta mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang baik secara moral , spritual serta intelektual .

B. Rumusan masalah

- Bagaimana Perkembangan dan Sejarah pendidikan kewarganegaraan?
- Bagaimana Ontologi Pendidikan kewarganegaraan ?
- Bagaimana epistemologi pendidikan kewarganegaraan?
- Apa aksiologi pendidikan kewarganegaraan ?

C. Tujuan Penulisan

- ✓ Untuk mengetahui perkembangan dan sejarah pendidikan kewarganegaraan
- ✓ Untuk memahami objek dan hakikat pendidikan kewarganegaraan
- ✓ Untuk mengetahui mendapatkan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan
- ✓ Untuk mengetahui manfaat dari pendidikan kewarganegaraan

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan teoritis, landasan historis, landasan sosiologi, dan landasan yuridis

1. Landasan filosofis

Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan disegala aspek bukan suatu hal yang mudah dan instan. Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan.

2. Landasan teoritis

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3. Landasan historis

Melihat pengalaman bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan dan kemerdekaan NKRI maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa, moralitas bangsa dalam kehidupan demokrasi yang seimbang dalam tanggung jawabnya dalam pembelaan Negara demi terjaga dan terwujudnya integritas bangsa.

4. Landasan sosiologis

Keanekaragaman yang ada pada Bangsa Indonesia harus di arahkan dan dibina dalam meningkatkan kesadaran bersama dalam kehidupan kesatuan bangsa Indonesia.

5. Landasan yuridis

Pasal 27 ayat(3) amandemen menyebutkan; setiap warga Negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 30 ayat(1); tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara.

Pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

A. Perkembangan dan sejarah PPkn

1. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969

istilah **civics** dan **Pendidikan Kewargaan Negara** digunakan secara bertukar pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah **Pendidikan Kewargaan Negara** yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945.

2. Dalam tahun 1973/1974

Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.

3. Dalam Kurikulum tahun 1975

istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi **Pendidikan Moral Pancasila (PMP)** yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan

4. Kurikulum PPKn 1994

Kurikulum ini mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development* (Taba, 1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

5. tahun 2004

Dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi **Kewarganegaraan**.

6. Tahun 2006

Namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal

Dengan **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**.

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus

mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikulum. Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum

sebagai berikut:

- (a) Kewarganegaraan (1956)
- (b) Civics (1959)
- (c) Kewarganegaraan (1962)
- (d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
- (e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
- (f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
- (g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)

B. Ontologi PPKn

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik **objek material** maupun **objek formal**.

Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu.

Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.

Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.

Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara.

Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:

- 1) Pengantar PKn
 - a. Hak dan kewajiban warga negara
 - b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
 - c. Demokrasi Indonesia
 - d. Hak Asasi Manusia
- 2) Wawasan Nusantara
- 3) Ketahanan Nasional
- 4) Politik dan Strategi Nasional

Hakikat Pendidikan kewarganegaraan

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata Negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia.

C. Epistemologi PPKn

Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan aspek ontologi pendidikan kewarganegaraan, karena memang proses epistemologis, yang pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya terkait pada obyek telaah dan obyek pengembangannya. Kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui :

1. metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan proses pengukuran dan generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi.
2. metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk membangun suatu teori.

Sedangkan, metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan

D. Aksiologi PPKn

Pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada di Indonesia memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 .

tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa dan negara.

Dari tujuan-tujuan yang tersebut sudah jelaslah bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat fital bagi bangsa dan negara, dan sudah barang tentu pendidikan kewarganegaraan ada di setiap jenjang pendidikan yang ada di indonesia karena bisa membuahkan generasi-generasi penerus yang diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa dan negara, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa dan bernegara. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat lain dari pendidikan kewarganegaraan

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah perkembangan PPKn secara konseptual :

- (a) Kewarganegaraan (1956)
- (b) Civics (1959)
- (c) Kewarganegaraan (1962)

- (d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
- (e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
- (f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
- (g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)

Ontologi PPKn

Dibagi dalam 2 objek , objek material & objek formal

Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.

Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.

Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara.

Epistimologi PPKn

Kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan .

Metode penelitian :dengan metode penelitian kuantitatif metode penelitian kualitatif

Metode pengembangan : dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman .

Aksiologi PPKn

- untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti
- untuk membentuk berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- untuk menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa dan negara
- membangun kesadaran bernegara untuk bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan
- unum membangun rasa kepekaan masyarakat dalam mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa dan bernegara

Saran

Dari pembahasan materi dalam makalah ini sudah jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat vital bagi bangsa dan negara, dan sudah barang tentu pendidikan kewarganegaraan ada di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia karena bisa membuahkan generasi-generasi penerus yang diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa dan negara. Oleh karena itu disarankan untuk tidak mengabaikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena jika kita mengabaikannya maka bangsa kita pasti akan kehilangan jati diri bangsa dan tergerus oleh arus budaya global.

Daftar Pustaka

Sutoyo, pendidikan kewarganegaraan, Graha ilmu : Jakarta 2008

Jujun S. Suriasumatri, Filsafat ilmu, pustaka sinar harapan : Jakarta 2007

<https://asepsutisna.wordpress.com/2009/10/26/perkembangan-pkn-di-indonesia/>

(diakses 8 desember pukul 12.00)

[http://www.academia.edu/8385772/Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia](http://www.academia.edu/8385772/Perkembangan_Pendidikan_Kewarganegaraan_di_Indonesia)

(Di akses 8 desember pukul 12.30)